



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 264 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL SEMESTER I
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat nasional dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/TIK.04-BA/13/2026 tanggal 20 Juli 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL SEMESTER I TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 264 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL SEMESTER I
TAHUN 2026



REKAPITULASI PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TINGKAT NASIONAL SEMESTER I TAHUN 2026

Model A-Rekap Nasional-PDPB

No.	Nama Provinsi/ Luar Negeri	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	ACEH	23	290	6.499	1.940.175	2.009.252	3.949.427	
2	SUMATERA UTARA	33	455	6.110	5.599.406	5.760.704	11.360.110	
3	SUMATERA BARAT	19	179	1.265	2.112.825	2.150.031	4.262.856	
4	RIAU	12	172	1.862	2.611.358	2.542.808	5.154.166	
5	JAMBI	11	144	1.585	1.425.853	1.401.142	2.826.995	
6	SUMATERA SELATAN	17	241	3.257	3.366.234	3.302.589	6.668.823	
7	BENGKULU	10	129	1.513	794.824	778.836	1.573.660	
8	LAMPUNG	15	229	2.651	3.439.163	3.342.621	6.781.784	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	47	393	577.383	556.200	1.133.583	
10	KEPULAUAN RIAU	7	80	419	836.859	832.243	1.669.102	
11	DK JAKARTA	6	44	267	4.061.651	4.173.084	8.234.735	
12	JAWA BARAT	27	627	5.957	18.955.266	18.804.726	37.759.992	
13	JAWA TENGAH	35	576	8.563	14.626.369	14.705.660	29.332.029	
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	78	438	1.438.982	1.515.182	2.954.164	
15	JAWA TIMUR	38	666	8.494	15.993.000	16.510.002	32.503.002	
16	BANTEN	8	155	1.552	4.701.468	4.637.409	9.338.877	
17	BALI	9	57	716	1.671.956	1.705.329	3.377.285	
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	117	1.166	2.046.278	2.127.512	4.173.790	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	315	3.442	2.076.843	2.144.697	4.221.540	
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	2.145	2.102.362	2.019.341	4.121.703	
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.571	1.063.224	1.005.880	2.069.104	
22	KALIMANTAN SELATAN	13	156	2.016	1.591.584	1.593.530	3.185.114	
23	KALIMANTAN TIMUR	10	105	1.038	1.531.397	1.434.146	2.965.543	
24	KALIMANTAN UTARA	5	55	482	284.242	262.292	546.534	
25	SULAWESI UTARA	15	171	1.839	1.016.823	996.860	2.013.683	
26	SULAWESI TENGAH	13	177	2.017	1.208.006	1.161.491	2.369.497	
27	SULAWESI SELATAN	24	313	3.059	3.414.188	3.599.523	7.013.711	
28	SULAWESI TENGGARA	17	221	2.285	985.456	995.926	1.981.382	
29	GORONTALO	6	77	729	455.527	459.875	915.402	
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	519.486	515.217	1.034.703	
31	MALUKU	11	119	1.234	676.076	711.261	1.387.337	
32	MALUKU UTARA	10	118	1.185	529.226	483.352	1.012.578	
33	PAPUA	9	105	993	408.332	388.997	797.329	
34	PAPUA BARAT	7	91	824	199.461	195.485	394.946	
35	PAPUA SELATAN	4	82	690	199.909	187.801	387.710	
36	PAPUA TENGAH	8	131	1.195	613.060	549.265	1.162.325	
37	PAPUA PEGUNUNGAN	8	252	2.625	705.223	613.121	1.318.344	
38	PAPUA BARAT DAYA	6	132	1.013	232.795	220.409	453.204	
	JUMLAH	514	7.285	83.737	106.012.270	106.393.799	212.406.069	
39	LUAR NEGERI	131			842.750	1.105.848	1.948.598	
	TOTAL	645	7.285	83.737	106.855.020	107.499.647	214.354.667	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Novy Hasbiy Munnawar